



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARTHA OCTAVIA
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 32033

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	854.865.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 854.865.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	673.650.000
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 380.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 33.750.000		
5. LAINNYA, SEPEDA LIPAT FNHON GUST Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
6. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 51.900.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	238.949.486
D. SURAT BERHARGA	Rp.	52.605.394
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	314.495.033
F. HARTA LAINNYA	Rp.	71.000.000
Sub Total	Rp.	2.205.564.913



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.205.564.913

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.